

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi pelayanan publik terus menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya di era modern (Laurens, 2024). Masyarakat menuntut adanya pendekatan secara inovatif dalam ranah pelayanan publik. Dalam hal ini, negara sangat berfungsi untuk memberikan pelayanan publik di segala sektor. Hal tersebut diperjelas melalui Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mendefinisikan bahwa pelayanan publik ialah segala rangkaian pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seluruh warga negara atas barang, jasa, atau pelayanan secara administratif. Dengan artian bahwa negara akan memberikan segala bentuk pelayanan kepada warganya. Terbitnya undang-undang tersebut semestinya dapat memberikan pedoman kepada seluruh penyelenggara layanan dengan standarisasi yang baik (Hutagalung, 2021).

Menurut Agus Sartono dalam (Prasodjo, 2023) menegaskan bahwa pelayanan adalah sebuah tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang dasarnya tidak memiliki wujud dan tidak mengakibatkan segala bentuk kepemilikan. Dengan kata lain, pelayanan adalah suatu perilaku produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen tersebut. Merujuk pada konsep pelayanan publik, negara selaku *regulator* dan *fasilitator* perlu memberikan segala jenis pelayanan, tak terkecuali pada penyandang disabilitas. Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin setiap hak warga negara.

Pada pasal 4 ayat (1) RUU tentang penyandang disabilitas dijelaskan, “Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik”. Secara definitif diuraikan bahwa penyandang disabilitas intelektual adalah mereka yang memiliki gangguan dalam kemampuan berpikir. Hal tersebut menyebabkan mereka akan kesulitan belajar atau pemahaman pembelajaran yang lambat seperti disleksia, *downsyndrome*, dan disabilitas grafis. Semakin berkembangnya jaman, hak dalam mendapatkan pelayanan yang sama merupakan hak yang harus diperoleh oleh individu penyandang disabilitas (Susanto & Yanuarita, 2021). Meskipun mengalami keterbelakangan, para penyandang disabilitas tetap memiliki keinginan dalam mendapatkan hak yang sama, tak terkecuali pada aspek pendidikan.

Hak tersebut dijabarkan pada 26 jenis klasifikasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Kementerian Sosial yang salah satunya adalah disabilitas. PPKS ialah individu maupun keluarga yang mengalami hambatan dalam melakukan interaksi pada lingkungan sekitar secara harmonis, kemudian mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara fisik dan mental secara layak (Maryatun & Nulhaqim, 2021). Dalam hal ini, disabilitas secara intelektual juga menjadi bagian dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Bentuk pelayanan bagi penyandang disabilitas semakin bervariasi, khususnya pada pelayanan untuk anak penderita disleksia.

Salah satu negara pelopor yang secara resmi mengakui disleksia sebagai kondisi yang memerlukan bantuan pemerintah adalah Amerika Serikat. Salim dan Yulianto (2021) dalam bukunya yang berjudul “Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas” menjelaskan bahwa Amerika Serikat telah mengesahkan *the American with Disability Act (ADA)* pada Tahun 1990 untuk melindungi dan memfasilitasi penyandang disabilitas, tak terkecuali disleksia. Jauh sebelum itu pada tahun 1975, Amerika Serikat mengesahkan *Education for All Handicapped Children Act* yang mewajibkan penyediaan pendidikan secara khusus bagi anak-anak dengan disabilitas termasuk disleksia.

Pada mulanya, penderita disleksia merupakan suatu urusan pribadi yang tidak menjadi urusan pemerintah. Namun semakin berkembangnya jaman, disleksia telah menjadi isu publik yang perlu diberikan pelayanan dan fasilitas oleh pemerintah. Dalam konteks lain, pemberian layanan disleksia juga mampu memberikan *output* berupa pengentasan buta huruf dan peningkatan literasi yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah saat ini terus berupaya membangkitkan budaya literasi melalui perpustakaan (Asmoro & Sari, 2020). Peran perpustakaan adalah sebagai rumah peradaban (Hamid et al., 2018). Keberadaan suatu perpustakaan menjadi hal penting bagi masyarakat. Sebab, perpustakaan dapat menjadi wadah untuk mewujudkan cita-cita bangsa (Pratiwi & Prathama, 2024).

Perpustakaan adalah salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berperan penting dalam menunjang pendidikan formal. Apalagi dengan masih tingginya angka putus sekolah, angka buta huruf, dan kurangnya minat baca masyarakat

karena berbagai faktor tertentu, maka keberadaan Pendidikan nonformal dianggap sebagai alternatif yang penting dalam mengatasi permasalahan tersebut (Hermawan et al., 2020). Pemerintah selaku *leading sector* yang bertugas untuk memenuhi kewajiban dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” terus melakukan upaya untuk mewujudkannya. Contohnya adalah Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan layanan disleksia melalui perpustakaan dengan tujuan untuk menjadikan kotanya sebagai kota literasi dan Kota Layak Anak (KLA)

Hal tersebut didukung oleh Hamid & Shintawati (2018) yang menyebutkan bahwa Surabaya sebagai kota literasi telah dicanangkan mulai dari kepemimpinan Walikota Ibu Tri Risma Harini, bahwa Kota Surabaya memiliki cita-cita untuk menjadi kota literasi pertama di Indonesia yang ditetapkan pada 02 Mei 2014. Untuk mendukung terwujudnya Surabaya sebagai kota literasi, maka terdapat Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan yang telah ditetapkan pada 03 Juni Tahun 2022. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus melakukan langkah-langkah strategis seperti membuka ratusan taman bacaan dan perpustakaan yang tersebar di seluruh kelurahan serta ruang publik lainnya.

Tentunya perpustakaan yang tersebar di seluruh lapisan Kota Surabaya juga perlu memperhatikan pelayanan yang baik, yakni ramah bagi penyandang disabilitas maupun anak kecil. Saat ini Kota Surabaya terus berupaya untuk mendukung Kota Layak Anak (KLA) di berbagai sektor, tak terkecuali pada perpustakaan. Adanya Kota Layak Anak (KLA) sangat menstimulus seluruh Kota di Indonesia untuk berlomba dalam memberikan pelayanan yang berupa

pemenuhan Hak bagi setiap anak (Perkasa & Wahyudi, 2024). Konsistensi Kota Surabaya dalam pemenuhan Hak anak dapat dilihat dari penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) selama 6 (enam) kali berturut-turut. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi pada proses penyerahan penghargaan.

”...Semoga tahun depan bisa pecah telur menjadi KLA dengan predikat tertinggi dan semoga Surabaya tidak sendirian, tapi kita bisa bersama kota-kota lainnya untuk menjadi Kota Layak Anak di Indonesia...”

(Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230723220037-293-976800/surabaya-raih-nilai-tertinggi-penghargaan-kota-layak-anak> Diakses pada 8 Desember 2024)

Penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang telah diraih oleh Kota Surabaya menunjukkan tekad bahwa Pemerintah Kota Surabaya benar-benar ingin memastikan pemenuhan hak bagi setiap masyarakat, termasuk bagi anak kecil maupun para penyandang disabilitas. Perlindungan kepada anak harus terus difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah selaku perpanjangan pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk mendukung program perlindungan anak (Faisea dkk., 2020).

Kota Layak Anak (KLA) ialah suatu sistem pengembangan melalui Kabupaten/Kota yang mampu menerapkan 3M yakni merencanakan, menetapkan, dan menjalankan rangkaian program Pembangunan yang fokus utamanya adalah pada hak dan kewajiban anak (Roza & S, 2018). Program pengembangan tersebut diatur agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Hal tersebut juga diatur melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan pada anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang

secara optimal. Segala bentuk program dan peraturan yang dibuat juga demi mewujudkan Kota Surabaya tanpa kekerasan dan diskriminasi pada anak.

Menurut Permenpan PPPA Nomor 11 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak ialah daerah yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak pada anak melalui integrasi komitmen serta sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam menjamin terpenuhinya hak dari setiap anak. Selanjutnya peraturan tersebut dijadikan pedoman oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Perwali Nomor 61 Tahun 2024 tentang “Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Perwali Nomor 62 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Perlindungan Khusus Kepada Anak”. Peraturan tersebut dilaksanakan untuk mendukung KLA, dimana dijelaskan oleh (Faisea dkk., 2020) bahwa KLA ini bertujuan untuk membangun tingkat inisiatif pemerintah daerah pada upaya ”*Convention on the Rights of the Child*” atau pada transformasi Konvensi Hak-hak Anak melalui strategi, kebijakan, maupun rangkaian pembangunan sebagai pemenuhan hak-hak anak pada Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya berusaha membentuk lingkungan perpustakaan yang aman dan nyaman untuk menjamin terpenuhinya hak anak serta sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program Kota Layak Anak. Pada dasarnya, perpustakaan perlu menyediakan layanan yang beragam dan memberikan manfaat yang langsung kepada penggunanya. Salah satunya adalah perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial perlu melakukan transformasi

menjadi tempat yang mengembangkan berbagai jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk saat ini hampir seluruh perpustakaan hingga pada level kelurahan telah melaksanakan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ramah pada anak. Terdapat beberapa program layak anak yang diusung oleh Dinas Perpustakaan Kota Surabaya, yakni PISA atau Pusat Informasi Sahabat Anak, wisata buku, perpustakaan keliling, dongeng isyarat, kelas literasi, kelas layanan disleksia, dan sebagainya. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Ibu Mia selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.

“...PISA adalah Pusat Informasi Sahabat Anak sebagai salah satu pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi. Ini menjadi salah satu supporting Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA). Nah, perpustakaan kita sudah mendapatkan akreditasi kategori Madya di tingkat nasional...”.

(Sumber : <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/perpustakaan-umum-kota-surabaya-raih-standarisasi-pisa-kategori-madya-dari-kemen-pppa-ri>
Diakses pada 12 Desember 2024)

Dapat dilihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya telah berupaya mendukung KLA melalui beberapa program yang telah dijalankan selama ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan perpustakaan yang bersifat ramah anak seperti kelas layanan disleksia. Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya telah memiliki 2 (dua) Perpustakaan Umum yang berakreditasi Nasional yakni pada Perpustakaan Umum Rungkut dan Perpustakaan Umum Balai Pemuda Kota Surabaya. Kota Surabaya terus berupaya dalam mendukung KLA melalui Pembangunan literasi masyarakat untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Pengembangan tersebut juga bertujuan untuk menunjang pembangunan layanan disleksia seperti yang dijelaskan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2022-2024

Tahun	IPLM	Kategori
2022	96,98	Sangat Tinggi
2023	84,28	Tinggi
2024	100,00	Sangat Tinggi

Sumber: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Perpusnas 2022-2024

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Surabaya telah mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan ukuran yang didapatkan melalui unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang didapat melalui data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat (Perpusnas, 2024). Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak telah berupaya memenuhi pembangunan fasilitas perpustakaan untuk menunjang pendidikan non formal seperti kelas layanan disleksia. Pada skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Surabaya dari Tahun 2022-2024 memang terlihat cukup fluktuatif. Namun, Kota Surabaya masih mampu mempertahankan pada skor yang sangat tinggi.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang tinggi juga sejalan dengan pengembangan program perpustakaan yang sangat bervariasi di Kota Surabaya. Menurut (Fatmawati, 2023) Pelaksanaan pengukuran IPLM merupakan hal yang sangat penting dimana perpustakaan kini menjadi urusan pemerintah daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan tersebut juga

sejalan dengan Program Kota Layak Anak (KLA) khususnya pada kategori Pendidikan non formal melalui perpustakaan bagi anak-anak. Melalui perolehan skor sangat tinggi yang diraih oleh Kota Surabaya, menunjukkan bahwa perpustakaan telah memfasilitasi anak penderita disleksia hingga mereka mampu membaca dan menulis.

Namun, hal tersebut juga terus menjadi tantangan pemerintah untuk terus mempertahankan skor yang baik, karena Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia yang berarti kepadatan penduduk di Kota Surabaya juga terus meningkat tiap tahunnya. Alasan utama yang mempengaruhi peningkatan urbanisasi di Kota Surabaya adalah faktor perekonomian (Anggraeni, 2022). Berdasarkan hal tersebut, maka banyak anak yang kurang perhatian karena kedua orang tuanya bekerja. Dampak yang dapat ditimbulkan ialah anak akan mengalami keterlambatan motorik dan berpengaruh pada kemampuan baca tulis atau biasa disebut dengan disleksia. Disleksia menurut Reynold dalam (Iza Syahroni dkk., 2021) ialah sebuah gangguan dalam proses belajar bahasa yang berdampak pada kemampuan dalam mengenal huruf, seperti menulis, membaca dan mengeja. Salah satu penyebab disleksia menurut Lidwina dalam (Nurfadhillah dkk., 2022) adalah faktor psikologis yang dapat disebabkan karena sang anak jarang mendapat perhatian dari orang tua, sering ditinggal orang tua, berpindah-pindah sekolah, emosional, tidak ceria, stres, dan hubungan yang buruk dengan guru.

International Dyslexia Association mengatakan bahwa terdapat sekitar 10-15% populasi di dunia adalah penderita disleksia. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Asosiasi Disleksia Indonesia mengutarakan bahwa terdapat 5 dari 50 juta anak

sekolah di Indonesia yang mengalami disleksia dengan rata-rata 2 juta kasus per tahunnya (Elmansyah dkk., 2023). Kasus tersebut tentunya menjadi tantangan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan kota literasi. Anak penderita disleksia juga cenderung menerima diskriminasi sehingga harus dilindungi dan difasilitasi agar mewujudkan Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Penanganan untuk penderita disleksia juga membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan orang tua membiarkan anaknya buta huruf hingga dewasa.

Menurut kajian dari (Fatoni, 2019), di Kota Surabaya prevalensi disleksia pada kalangan anak-anak, khususnya pada Sekolah Dasar Inklusi tercatat sekitar 0,96% yang berarti dari setiap 104 siswa terdapat satu diantaranya yang mengalami disleksia. Dalam ranah yang lebih umum, menurut Dyslexia Center Indonesia permasalahan disleksia mencapai prevalensi 10% atau biasanya terdapat 2-3 siswa yang mengalami disleksia dari setiap kelas yang berisi 30 siswa. Hal tersebut juga dapat semakin bertambah karena masih banyak penderita disleksia di Kota Surabaya yang belum teridentifikasi.

Melihat fenomena di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya melalui Perpustakaan Umum Balai Pemuda menjadi satu-satunya perpustakaan di Jawa Timur yang memiliki *Dyslexia Corner*. Program tersebut telah berjalan dari tahun 2016 yang rutin dilakukan setiap hari tanpa adanya pungutan biaya. *Dyslexia Corner* atau Kelas Layanan Disleksia merupakan kelas *treatment one by one* untuk anak usia 6-9 tahun yang disediakan oleh Perpustakaan Umum Balai Pemuda Kota Surabaya dengan menggunakan aplikasi *LexiPal*, membaca buku sederhana dan menulis.

LexiPal merupakan aplikasi yang berfokus sebagai langkah untuk membantu anak dengan masalah kesulitan belajar spesifik atau disleksia (Febriana, 2018). Aplikasi tersebut mengadopsi *multisensory* method dengan pendekatan yang melibatkan berbagai indra anak untuk menangkap sebuah informasi melalui sensor penglihatan (*visual*) dengan melihat beberapa gambar dengan berbagai warna, selanjutnya melalui sensor pendengaran (*auditori*) yang berasal dari suara gambar bergerak, lalu sensor sentuhan (*taktil*) dengan menyentuh gambar yang bergerak dan sensor gerak (*kinetik*) dengan melibatkan seluruh tubuh secara aktif dalam membantu anak untuk menyerap informasi secara lebih mudah.

Aplikasi LexiPal yang ada di Perpustakaan Balai Pemuda adalah sebuah program yang dipersembahkan dari DPSG (*Dyslexia Parent Support Group*) Jawa Timur. Aplikasi tersebut diinstal melalui 2 (dua) komputer yang masing-masing dilengkapi dengan sensor *kinect* dan *mouse* yang berguna untuk menangkap rangsang gerakan. Aplikasi LexiPal juga digunakan sebagai layanan untuk dapat mendeteksi secara dini kepada anak-anak penyandang disleksia. Pada saat ini, perpustakaan di seluruh Indonesia masih sangat jarang dalam menyediakan layanan khusus bagi anak disleksia. Layanan kelas disleksia ini perlu dimanfaatkan dengan sangat baik guna memfasilitasi permasalahan disleksia yang tiap tahun selalu ada. Selain itu, layanan ini bertujuan sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam meningkatkan minat baca/literasi, mutu pendidikan, dan pemeliharaan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kategori disleksia. Terdapat beberapa data kelas layanan disleksia di Perpustakaan Balai Pemuda pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Peserta Kelas Layanan Disleksia Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Peserta	Usia	Asal Kota
2022	9	7-8 Tahun	Surabaya dan Sidoarjo
2023	11	7-8 Tahun	Surabaya
2024	23	6-9 Tahun	Surabaya, Gresik, dan Madura

Sumber: Data Peserta Layanan Disleksia oleh Perpustakaan Balai Pemuda

Pada tabel 1.2 di atas terlihat bahwa program kelas layanan disleksia di Perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya terus mengalami peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun. Peserta kelas layanan disleksia juga tidak hanya berasal dari Kota Surabaya, namun terdapat beberapa kota di sekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik, dan Madura. Untuk dapat menjadi peserta kelas layanan disleksia, orang tua perlu melakukan *screening test* IQ terlebih dahulu dan mendapatkan surat rekomendasi dari pihak rumah sakit. Peserta juga dapat mendaftar dengan berkunjung langsung ke *front office* Perpustakaan Balai Pemuda, atau langsung menghubungi mentor kelas disleksia, maupun mengirim pesan melalui DM *Instagram* ke @perpusbalpem. Program layanan disleksia ini menjadi salah satu program unggulan Perpustakaan Balai Pemuda. Pelaksanaan program ini telah berjalan dengan rutin mulai dari 30 Juli tahun 2016 hingga sekarang. Tindakan tersebut juga sejalan dengan sistem pembangunan Kota Layak Anak (KLA) dengan melaksanakan 3M yakni merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan segala pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.

Namun, pelaksanaan layanan disleksia di Perpustakaan Balai Pemuda masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun data yang telah ditunjukkan telah memberikan hasil yang positif, tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang berhubungan dengan aspek manajemen dan operasional program. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan adalah terkait kuantitas sumber daya manusia. Program layanan disleksia ini hanya memiliki 1 (satu) mentor bimbingan belajar dan 1 (satu) pendamping. Dengan sumber daya manusia yang sedikit tentunya dapat mempengaruhi efektivitas dalam proses layanan disleksia. Kendala selanjutnya adalah masalah teknis seperti pemeliharaan infrastruktur yang tidak dilakukan secara rutin. Fasilitas pendukung belum sepenuhnya menunjang kegiatan karena tidak adanya pembaruan metode dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, terdapat kendala terkait alur komunikasi yang mempengaruhi pelaksanaan program ialah terkait penjadwalan kelas layanan disleksia yang dijalankan secara tentatif atau melalui janji temu bersama orang tua pengguna layanan yang terkadang menghambat efisiensi waktu. Pelaksanaan program dilakukan dengan waktu 90 menit per sesi dengan jumlah peserta kurang lebih 23 anak. Jumlah peserta dengan sumber daya manusia di lapangan berbanding terbalik, serta masih sering terdapat miskomunikasi pada penjadwalan kelas sehingga sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi layanan disleksia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi layanan disleksia, seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi. Setiap faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting terkait efektivitas sebuah program,

karena jika berbagai faktor tersebut tidak diperhatikan maka akan menimbulkan permasalahan. Tingkat permasalahan yang ditimbulkan tergantung pada seberapa banyak kendala yang ditimbulkan dari setiap faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu implementasi. Dengan memperhatikan serta mengatasi kendala tersebut, diharapkan implementasi layanan disleksia di Perpustakaan Balai Pemuda dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberi manfaat secara maksimal kepada masyarakat secara luas.

Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis implementasi layanan disleksia pada Perpustakaan Balai Pemuda dalam mendukung Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Analisis dilakukan melalui teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan menawarkan kerangka kerja komprehensif dalam memahami tiap faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu layanan. Hal tersebut begitu penting karena mampu memberikan gambaran yang jelas terkait sejauh mana program layanan ini telah berhasil mencapai tujuan dan evaluasi yang diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menekankan pentingnya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi sebagai pondasi utama pada implementasi program layanan yang efektif.

Peneliti telah membandingkan beberapa penelitian sebelumnya dan menyimpulkan bahwa Program Kelas Layanan Disleksia mampu menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Dari analisis perbedaan dengan beberapa jurnal sebelumnya yang relevan, belum terdapat

penelitian yang mencakup topik layanan disleksia oleh Perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemberian hak dan pemberdayaan kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara umum, sementara pada penelitian ini lebih berfokus terkait implementasi layanan disleksia pada Perpustakaan Balai Pemuda dalam mendukung Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini akan menggambarkan implementasi yang dijalankan oleh Perpustakaan Balai Pemuda sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab Kota Surabaya dalam pemenuhan hak anak.

Hal tersebut menjadi dorongan penulis untuk melaksanakan penelitian di Perpustakaan Balai Pemuda Kota Surabaya dengan judul **“Implementasi Layanan Disleksia Pada Perpustakaan Balai Pemuda dalam Mendukung Kota Layak Anak di Kota Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Layanan Disleksia Pada Perpustakaan Balai Pemuda dalam Mendukung Kota Layak Anak di Kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan Implementasi Layanan Disleksia Pada Perpustakaan Balai Pemuda dalam Mendukung Kota Layak Anak di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan hasil berupa tambahan pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat, terutama terkait dengan Implementasi Layanan Disleksia Pada Perpustakaan Balai Pemuda dalam Mendukung Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh peneliti kepada pembaca.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan informasi faktual yang dapat dijadikan referensi berharga bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai acuan atau bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya khususnya Perpustakaan Balai Pemuda terkait layanan disleksia.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan bacaan lebih lanjut oleh mahasiswa sebagai sumber penelitian sejenis yang ada di UPN "Veteran" Jawa Timur.